



"Maka kalau anda membaca tulisan-tulisan Pak John, atau mendengar sendiri ia berbicara, hampir-hampir tidak bisa dilepaskan keterjalinan pengetahuan mendalam dalam bidang teologi dan sosiologi agama itu, dan bagaimana itu difahami (atau lebih baik: dihidupi) di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia."

~ Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe (Ketum PGI)

Buku Penghormatan Ulang Tahun ke-64 Profesor John Adrianus Titaley, Th.D

NYANTRI

Bersama John Titaley

Menakar Teks, Menilai Sejarah
dan Membangun Kemanusiaan Bersama

Editor:
Steve Gaspersz
Tedi Kholiludin



Masroq At

NYANTRI BERSAMA JOHN TITALEY

*Menakar Teks, Menilai Sejarah dan
Membangun Kemanusiaan Bersama . .*

**Editor:
Steve Gaspersz
Tedi Kholiludin**



**Buku Penghormatan Ulang Tahun ke-64
Profesor John Adrianus Titaley, Th.D**

YOGYAKARTA



**Satya Wacana University Press
2014**

261
Nya
n

Nyantri Bersama John Titley : Menakar Teks, Menilai
Sejarah dan Membangun Kemanusiaan Bersama ;
Buku Penghormatan Ulang Tahun ke-64 Profesor John
Adrianus Titley, Th.D / editor Steve Gaspersz, Tedi
Kholiludin.-- Salatiga : Satya Wacana University Press,
2014.
552p. ; 21 cm.

ISBN 978-979-8154-76-8

1. Christian sociology 2. Church and social problems
3. Christianity and other religions I. Titley, John
Adrianus II. Gaspersz, Steve III. Kholiludin, Tedi

ISBN 978-979-8154-76-8

Editor:

Steve Gaspersz
Tedi Kholiludin

Desain dan Layout:

Abdus Salam

All rights reserved. Save Exception stated by the law, no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system of any nature, or transmitted in any form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, included a complete or partial transcription, without the prior written permission of the author, application for which should be addressed to author.



Diterbitkan Oleh:

Satya Wacana University Press
Universitas Kristen Satya Wacana
Jl. Diponegoro 52-60 Salatiga 50711
Telp. (0298) 321212 Ext. 229, Fax. (0298) 311995

Daftar Isi

Kata Sambutan Ketua Umum PGI

Pdt Dr Andreas A. Yewangoe iii

Kata Pengantar vii

Daftar Isi xvii

1. Menenun Benang-benang Kebaikan: John Titaley yang Saya Kenal
Elizabeth Helena Mesdila 1
2. Tuhan adalah Gembalaku: Melihat Sosok “Gembala” John Titaley
Jack Adam 25
3. Indonesia Dayak atau Dayak Indonesia? – John Titaley dalam Ingatan Saya
Evi Nurleni 36
4. Tradisi Intelektualisme John Titaley
Abdul Manaf Tubaka 50
5. John Titaley menurut Sumber T (Titaleyan)
Theodorus Benyamin Sibarani 61

6. John Titaley di Mataku
Sumanto Al Qurtuby 73
7. John Titaley: Sang Teolog Sipil Bangsa Indonesia
Chlaodhius Budhianto 98
8. Mengaji kepada Titaley
Tedi Kholiludin 123
9. Mendialogkan Persoalan Perempuan Indonesia dengan Pemikiran John Titaley
Nancy Novitra Souisa 154
10. Kekristenan dalam Proses Mengindonesia
Steve Gaspersz 179
11. Berteologi dalam Dialog dan Praksis di Konteks Multikultur-Poskolonial Indonesia
Mariska Lauterboom 210
12. Orangtua dari Ouw: Durkheim, Titaley dan *Ritual Performance*
Izak Lattu 230
13. Merencanakan yang Selanjutnya: Suatu Analisa tentang Relevansi Metode-metode Hermeneutik dalam Studi Perjanjian Lama di Indonesia
Ira D. Mangililo 251
14. Demokrasi yang Menjadi Beban: Membaca 1 Samuel 8:1-22 sebagai Orang Indonesia
Elifas Tomix Maspaitella 279
15. Karakteristik Model Berteologi John Titaley
Ronald Helweldery 298
16. Habermas, Titaley dan Diskursus Agama *Founding Fathers*
Gusti A.B. Menoh 332

17. Pemahaman dan Pemaknaan Pancasila sebagai Agama Sipil dalam Pelaksanaan Misi Agama-agama
I Made Priana 380
18. Agama dan Nasionalisme: Ketegangan yang harus Dipersatukan
Masroer 395
19. Menegakkan Semangat Kebangsaan dan Penegakan Hukum: Refleksi Pemikiran John Titaley
Theofransus Litaay 413
- Diskusi Pemikiran John Titaley 431
- John Titaley Menjawab 490
- Tentang Penulis522

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Agama dan Nasionalisme: Ketegangan yang harus Dipersatukan

— Masroer Ch. Jb. —

Pengantar

Artikel lepas yang mungkin tidak begitu kompleks analisisnya ini ditulis dengan maksud sebagai “kado” akademik penghormatan ulang tahun yang ke-64 Profesor Dr. John Titaley (saat ini Rektor UKSW), sekaligus juga dalam kerangka mengeksplorasi pemikiran intelektual beliau, terutama dalam pengembangan sosiologi agama di Indonesia, sebagaimana yang dirintis dan dikembangkan di UKSW. Sebagai salah seorang mahasiswa beliau sejak menjalani studi S2 pada Program Pascasarjana Sosiologi Agama UKSW, saya menemukan benang merah pemikiran beliau yang menarik dan patut diteladani, yakni mengenai bagaimana agama-agama dalam konteks sosiologis memainkan peran strategisnya membangun keindonesiaan sebagai konteks agama-agama itu tumbuh dan berkembang.

Sejak saya menjadi mahasiswa S2 sampai S3 saat ini, yang dapat ditangkap dari spektrum pemikiran beliau adalah keresahan akan nasib negara kebangsaan Indonesia yang didirikan oleh para pendiri bangsa ini akibat pertentangan-pertentangan paham yang ditimbulkan karena perbedaan etnik dan agama. Untuk itulah dalam setiap perhelatan kuliahnya, beliau selalu berupaya menekankan signifikansi mendialogkan agama dalam konteks gagasan nasionalisme Indonesia. Dengan perspektif sosiologi agama, Pak John – yang sehari-hari menampakkan pribadi bersahaja dan sangat *nJawani* ini – selalu mengungkapkan bahwa agama memiliki signifikansi dalam membangun nasionalisme Indonesia.

Lebih jauh, Pak John selalu menandakan bahwa Indonesia yang diidealkan bukanlah Indonesia menurut model negara-negara Barat, atau Indonesia menurut negara-negara Timur Tengah. Tetapi Indonesia menurut Indonesia, yakni Indonesia baru yang dimulai berdirinya sejak Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan dasar-dasar teologi dan politiknya yang telah disepakati bersama sebagai konsensus nasional. Indonesia yang mampu membangun keragaman dan kemajemukan di tengah modernitas masyarakatnya yang terus hidup dinamis dan progresif.

Di atas dasar pemikiran itulah, artikel ini disusun untuk mengembangkan wacana nasionalisme Indonesia sebagaimana yang sering diajarkan oleh Pak John. Bahkan, bisa jadi, wacana nasionalisme yang disampaikan oleh Pak John pada setiap perkuliahan yang disampaikan kepada para mahasiswanya itu yang rupanya membentuk karakteristik keilmuan yang cukup kuat dalam studi sosiologi agama di UKSW. Ini artinya studi agama dalam pendekatan sosiologi yang ditekuni

di UKSW memiliki karakteristik untuk menempatkan posisi dan peran agama (agama) dalam menguatkan bangunan nasionalisme Indonesia. Selain itu, tentu saja saya berharap tulisan ini dapat memberi nilai tambah bagi wawasan kebangsaan kita di tengah percaturan global yang terus berubah saat ini.

Nasionalisme Indonesia: Dari Persatuan, Keadilan ke Kemanusiaan

Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia adalah entitas baru yang lahir dari pergolakan melawan imperialisme dan kolonialisme bangsa-bangsa Barat. Ketika imperialisme dan kolonialisme menginjakkan kakinya di bumi nusantara, keindonesiaan sebagai entitas baru itu belum ada. Ia hanyalah suatu kawasan yang terdiri dari gugusan pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan luas, membentang dari Sabang (Aceh) di sebelah barat sampai ke Merauke (Papua) di timur. Gugusan pulau itu dikenal dengan nama nusantara sejak dulu kala. Posisi wilayahnya yang strategis dan subur karena terletak di sebelah selatan wilayah Asia Tenggara dengan gugusan pegunungannya yang aktif dan Samudera Hindia sebelah utara, memancing bangsa-bangsa asing untuk singgah dan mengeksplorasi nusantara.

Gugusan pulau-pulau itu (dengan berbagai ukuran: kecil, sedang dan besar) ternyata dihuni ratusan kelompok suku yang memeluk agama-agama yang berbeda, berkomunikasi dengan bahasa dan dialek yang berbeda, serta menjalani hidup dengan beraneka ragam budaya. Semua itu menjadi penanda karakteristik kemajemukan masyarakat nusantara meskipun secara umum dapat dilihat pula kesamaan ciri-cirinya, misalnya

pola kehidupan sosial yang tradisional, keterikatan pada pranata-pranata adat-istiadat dan tradisi budaya lokal yang diwariskan dari para leluhur.

Selain ciri tradisional dan adat-istiadatnya, struktur sosial masyarakat nusantara yang sebagian besar berada dalam komunitas-komunitas suku atau klan masih sangat kuat dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan yang berpusat pada “raja” atau “kepala suku” dengan otoritas tradisional yang sangat besar dalam memimpin masyarakatnya. Peran dan status otoritatif para raja dan kepala suku itu lahir dari ikatan sosial yang berbentuk kekerabatan yang pada gilirannya menjadi simbol pengikat masyarakat dalam membangun solidaritas sosialnya. Dengan pola kemasyarakatan semacam itu, mereka menjadi “rujukan” (patron) yang ditiru dan model dalam bertingkah laku dalam masyarakat. Sebagai patron, para raja dan kepala suku itu tidak dipilih tetapi menerima “jabatan” itu sebagai warisan turun temurun dari leluhur mereka. Dengan model kepemimpinan tradisional semacam ini maka terbentuklah dinasti-dinasti lokal yang dalam keadaan tertentu dapat bersengketa dan saling berperang memperebutkan kekuasaan demi kedudukan dan harta (tanah dan kebutuhan ekonomi).

Semangat primordialisme dan sektarianisme kesukuan seperti ini yang sering memicu ketegangan politik antarkomunitas lokal di nusantara. Komunitas-komunitas lokal ini tidak hidup dalam kesadaran mengenai kesatuan geopolitik. Dinamika sosial-budaya setiap komunitas lokal nusantara pun pada gilirannya menghadapi berbagai arus perubahan (perdagangan, pertukaran kebudayaan, kawin-mawin antarkelompok suku/etnis yang berbeda, tuntutan kehidupan dll).

Seiring dengan berjalannya waktu, perubahan-perubahan yang dialami oleh berbagai komunitas lokal nusantara memperlihatkan melemahnya kekuatan politik para raja dan kepala suku. Kondisi tersebut makin diperparah sejak kehadiran kekuatan bangsa-bangsa asing dalam bentuk kolonialisme dan imperialisme ke wilayah nusantara yang tidak dapat ditolak.

Pada mulanya mereka memang berniat untuk berdagang dengan para raja dan kepala suku, kemudian untuk maksud itu mereka membangun kongsi dagang di masing-masing daerah. Sebagai upaya untuk melindungi kongsi-kongsi perdagangan di pelabuhan-pelabuhan utama, bangsa-bangsa asing itu membangun kekuatan militer dan politik yang cukup solid. Untuk menjalankan administrasi ekonomi-politik kolonial mereka menciptakan pemerintahan baru yang "modern" di daerah-daerah jajahan. Sejarah perdagangan rempah-rempah yang mengundang datangnya bangsa-bangsa asing dan kolonialisme merupakan dimensi historis yang turut membentuk entitas politik baru kelak bernama "Indonesia".

Dengan demikian, memahami Indonesia mesti diletakkan dalam bingkai sejarah sosial-ekonomi-politik yang turut membentuk mindset kebudayaan dan karakteristik masyarakat nusantara (era pra-Indonesia) yang kemudian berhasil menentukan nasibnya sendiri sejak memproklamasikan kemerdekaan politiknya dan memasuki era Indonesia. Jelas bahwa pengalaman kolonialisme telah meninggalkan guratan dalam penderitaan hidup masyarakat terjajah nusantara. Eksploitasi ekonomi dan politik ini menghasilkan masyarakat terjajah yang hidup dalam ketidakberdayaan sosial dan terpecah-belah dalam perbedaan suku dan

agama. Era kolonialisme yang panjang ini pada gilirannya turut menciptakan pengelompokan masyarakat pribumi sebagai masyarakat kelas tiga dalam struktur sosial masyarakat Indonesia, setelah komunitas Cina dan Eropa.

Pada satu sisi, pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang berkuasa cukup lama ini berhasil memberikan warna baru dalam kehidupan bangsa Indonesia, modernisasi pengelolaan negara, kelembagaan pendidikan yang berorientasi kerja (bandingkan dengan kelembagaan pendidikan pesantren yang berorientansi agama), serta industrialisasi ekonomi terutama dengan kehadiran pabrik-pabrik gula, karet, dan modernisasi alat transportasi (kereta api dan mobil) yang sebelumnya hanya menggunakan alat transportasi kuda dan gerobak/kereta. Situasi ini telah membuat masyarakat nusantara menerima perubahan baru dalam kehidupan komunalnya. Namun, pada sisi lain, semangat kolonialisme yang dibawa oleh Pemerintah Hindia Belanda lebih banyak menimbulkan kerugian dan beban penderitaan bagi masyarakat lokal.

Tidak dapat disangkal bahwa motivasi awal dan utama Pemerintah Hindia Belanda jelas adalah keuntungan ekonomi yang diperoleh melalui pengelolaan (monopoli) sumber daya alam sebesar-besarnya, seperti: minyak, rempah-rempah, hasil hutan, yang semuanya diarahkan bagi akumulasi kekayaan di negara asalnya, Eropa. Jelas pertimbangan ekonomi lebih mendominasi relasi-relasi subjek-objek antara pemerintah penjajah dan masyarakat terjajah, bukan soal "cinta tanah air". Pemerintahan kolonialisme Hindia Belanda sekaligus menancapkan kekuasaan politik yang tidak memberikan kesempatan kepada komunitas-komunitas nusantara ini

untuk menentukan nasib sendiri. Eksploitasi sumber daya alam, monopoli ekonomi dan penguasaan politik ini kemudian melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi, politik dan sosial. Di bawah cengkeraman pemerintahan kolonial Hindia Belanda, kondisi masyarakat nusantara berada dalam keterpurukan.

Situasi keterpurukan, ketimpangan, dan ketidakadilan yang menyeret masyarakat nusantara dalam penderitaan dan pemiskinan tersebut kemudian telah menjadi pemecut kesadaran kritis kaum cendekiawan, seperti Soekarno. Dengan kesadaran akan harga diri dan martabat kemanusiaan nusantara, Soekarno menawarkan gagasan baru tentang Indonesia merdeka. Gagasan awal "nasionalisme" Soekarno tersebut dibangun dengan basis anti kolonialisme dan imperialisme, serta bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kemerdekaan sebuah bangsa dengan landasan ideologi baru Indonesia merdeka. Dengan wawasan politik yang luas dan analisis yang tajam mengenai segi negatif kolonialisme dan imperialisme, Soekarno berhasil membangunkan kesadaran nasionalisme di kalangan masyarakat nusantara dengan imajinasi masyarakat merdeka yang berdaulat.

Kesadaran nasionalisme ini tidak lahir serta-merta, melainkan bersamaan dengan merebaknya gagasan-gagasan ideologis yang masuk dalam pergerakan masyarakat di tengah perubahan sosial awal abad ke-20. Misalnya, Islam yang menjadi alat ideologis yang direpresentasikan dengan lahirnya gerakan keagamaan model NU dan Muhammadiyah bersamaan dengan gelombang pembaruan Islam dari Timur Tengah yang masuk ke wilayah Hindia Belanda. Gerakan-gerakan keagamaan ini hendak menumbuhkan Islam sebagai

kekuatan nasional yang dapat dipercaya sebagai alat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Barat. Model “nasionalisme” yang lahir dari inspirasi Islam ini juga ditangkap ide dan gerakannya oleh Soekarno sebagai ideologi (isme) baru melawan kolonialisme dengan menyebutnya “Islamisme”.

Istilah “Islamisme” dipakai oleh Soekarno untuk menyebut gerakan keagamaan melawan kolonialisme pada awal pertumbuhan pergerakan kebangsaan Indonesia. Namun, gagasan-gagasan “ideologi” kaum muslimin yang bersifat khusus ini tidak berdiri sendiri. Di sisi lain, muncul pula kelompok-kelompok lain yang mengusung gagasan ideologis Marxisme sebagai ideologi yang ampuh untuk mengobarkan semangat perlawanan masyarakat menentang kolonialisme dan imperialisme Barat. Mereka beranggapan bahwa watak kolonialisme/imperialisme bertentangan dengan semangat dan nilai-nilai Marxisme yang diusung oleh para tokoh pergerakan nasional saat itu. Di tengah ketegangan tiga ideologi utama saat itu – Nasionalisme, Islamisme, Marxisme – Soekarno berhasil mengawinkan ketiganya menjadi spirit perlawanan menentang kolonialisme/imperialisme dan membangkitkan nasionalisme kebangsaan bagi kemerdekaan Indonesia.

Ketegangan Agama di tengah Spirit Nasionalisme Indonesia

Agama (keislaman) dan nasionalisme, menurut saya, perlu disejajarkan sebab pandangan tersebut sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dibentuk sebagai negara yang dijiwai oleh pandangan keagamaan dan semangat nasionalisme.

Realitas kemajemukan sosial-budaya masyarakat nusantara, yang kemudian menyatu dalam kesepakatan “menjadi Indonesia”, merupakan konteks perjumpaan yang mengundang segenap anak bangsa untuk menghargai dan menjunjung tinggi kebhinnekaan (agama, budaya, bahasa, etnis dll). Pada taraf tertentu, kepelbagaian dalam kehidupan sosial masyarakat dapat menjadi acuan untuk menemukan simpul-simpul yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika dikelola dengan arif, simpul-simpul ini mampu mendorong perubahan dalam masyarakat sehingga kehidupan sosial berlangsung secara dinamis. Perubahan sosial sendiri merupakan salah satu koncern penting dalam pandangan keislaman, yang menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk terlibat secara positif dalam dinamika perubahan sosial sebagai pembawa rahmat, peradaban, budaya, dan moral.¹

Nasionalisme adalah satu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.² Ikatan ini terjadi saat sekelompok manusia mulai hidup bersama dan menetap dalam suatu wilayah tertentu. Dalam proses perjumpaan dan interaksi selama beberapa waktu, muncul naluri mempertahankan diri yang kemudian sangat berperan dalam mendorong mereka mempertahankan negeri dan tempat mereka menggantungkan hidup.

Pada zaman modern saat ini, nasionalisme merujuk kepada amalan politik dan ketentraman yang berlandaskan nasionalisme secara etnik dan keagamaan. Para ilmuwan politik biasanya menumpukan penyelidikan mereka kepada nasionalisme yang ekstrem, seperti Nazisme, pengasingan dan sebagainya.³ Agama dapat menjadi salah satu instrumen ideologis yang

menggerakkan nasionalisme suatu bangsa, seperti yang terjadi di banyak negara. Agama dapat menjadi sumber penggerak (*dynamic-engine*) perubahan dalam masyarakat, termasuk perlawanan terhadap tirani kekuasaan suatu rezim maupun menentang kekuatan-kekuatan asing.

Namun demikian, dalam berbagai proses-proses politik, agama tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik kepentingan di antara pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, secara sosiologis agama tidak bebas nilai (*value-free*), bahkan dapat menjadi “candu” pikiran seperti yang tampak dalam fenomena beragama akhir-akhir ini. Upaya memahami dinamika keberagamaan (internal dan eksternal) dengan menggunakan perspektif sosiologis tidak selalu ditanggapi penting karena agama condong dimasukkan dalam ranah wacana teologis dan dogmatis. Padahal, perspektif sosiologis agama sebenarnya hendak membuka ruang-ruang wacana yang lebih konkret dalam memahami kedudukan, peran dan fungsi agama dalam suatu konteks kemanusiaan. Sama halnya, memahami Islam sebagai agama kemanusiaan bukan sesuatu yang mudah dan malah berisiko menghadapi kecenderungan pemikiran arus utama yang melihatnya sebagai sebetulnya penyimpangan atau bahkan kesesatan. Agama lebih condong diterima dan diperlakukan sebagai doktrin yang keras. Dalam konteks kehidupan bersama sebagai suatu bangsa, kecenderungan memperlakukan agama semacam ini dapat berimplikasi pada makin luntarnya rasa nasionalisme diri terhadap negara. Posisi dan fungsi negara sebagai entitas yang mewadahi interaksi dan dinamika sosial masyarakat tidak dianggap signifikan dibandingkan dengan peran dan fungsi agama bagi kehidupan manusia sebagai individu. Pada titik itu, wacana agama dan negara menjadi arena kontestasi

identitas dalam menentukan apa yang menjadi tujuan utama kehidupan sosial suatu masyarakat dan di atas dasar apa tujuan itu akan dicapai.

Penelusuran sejarah nusantara dan kemudian sejarah “menjadi Indonesia” sejak diproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 memperlihatkan dengan jelas bahwa di Indonesia perdebatan antara kelompok nasionalis-sekuler dengan nasionalis-agama tidak pernah selesai. Kedua kubu ideologis ini terus berada dalam ketegangan dan bertarung memperebutkan hegemoni kekuasaan. Beberapa sejarawan Indonesia kontemporer cenderung menelusuri pertarungan ideologis tersebut sejak perdebatan mengenai Piagam Jakarta, tetapi ada juga yang mengambil klaim lebih jauh lagi hingga ke pertarungan dalam tubuh Sarekat Islam pada tahun 1910-an.⁴ Beberapa studi sejarah mengenai hal di atas memunculkan anggapan bahwa dalam pertarungan itu, kelompok nasionalis-sekuler selalu tampil sebagai “pemenang”. Klaim ini mungkin benar, tetapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok sekuler bukannya tanpa syarat. Terdapat banyak contoh mengenai pergumulan politik di Indonesia yang telah menghasilkan kultur politik hibrida dengan mencampurkan ide-ide yang secara prinsip sebenarnya memiliki perbedaan.

Dengan kata lain, kepentingan “kelompok Islam” sebenarnya juga sudah membaur di dalamnya. Tendensi akan kultur hibrida ini menyiratkan bahwa kontruksi religiositas di Indonesia bukanlah sesuatu yang kaku-beku melainkan senantiasa dihadapkan pada tantangan perubahan dan terus mengalami proses modifikasi. Agama-agama besar yang ada di Indonesia secara historis merupakan agama-agama “impor”, yang diperkenalkan

dari luar kepada masyarakat nusantara, menanamkan akar religiositasnya secara bertahap, dan muncul kembali sebagai religiositas yang “baru” karena telah mengalami pembauran kultural dengan kebudayaan-kebudayaan lokal nusantara/Indonesia. Agama yang datang tidak pernah diterima secara *taken for granted* melainkan mengalami adaptasi dalam bentuk akulturasi (percampuran dengan budaya setempat).

Dari proses-proses akulturasi praktik-praktik ritual keagamaan, kontekstualisasi makna etis ajaran-ajaran agama, hingga kemudian religiositasi hibrida tersebut mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap kehidupan dalam arti luas, termasuk dalam bidang politik. Inilah yang kemudian membentuk cara pandang politik yang sulit atau bahkan mustahil dilepaskan dari pengaruh ajaran dan etika agama. Pergerakan politik dan perkembangan ide-ide nasionalisme, di Indonesia dan negara-negara lain, jelas memperlihatkan pembauran gagasan agama dan politik yang turut pula mendorong lahirnya ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial.⁵

Isu-isu semacam inilah yang mendorong lahirnya wacana Islam dan politik atau Islam dan nasionalisme sebagaimana yang dimunculkan oleh sejumlah pemikir Islam di Indonesia. Hasilnya, lahirlah beragam pemikiran yang menyebutkan bahwa nasionalisme dan Islam adalah dua gagasan yang memiliki kepentingan yang sama dan tidak bertentangan.⁶ Meskipun demikian, tidak terhindari pula munculnya berbagai perbedaan persepsi mengenai Islam dan nasionalisme di kalangan muslim sendiri. Salah satu faktornya, menurut saya, adalah tingkat pemahaman, pengetahuan dan perilaku beragama muslim di Indonesia juga berbeda karena

konteks kehidupan yang berbeda pula. Apa yang dipahami oleh muslim di wilayah-wilayah pedesaan akan berbeda dengan pemahaman dan perilaku muslim di perkotaan. Perilaku muslim di perkotaan tentu saja sangat dipengaruhi oleh tingkat keterbukaan yang lebih besar dan mapannya sistem pendidikan di kota. Kendati tidak bisa pula dijamin bahwa perilaku beragama muslim urban akan dengan sendirinya memperkuat rasa kebangsaan/nasionalisme.

Longgarnya ikatan-ikatan sosial di perkotaan turut mempengaruhi kekentalan solidaritas sosial, dan makin memperkuat individualisme, termasuk dalam beragama. Semangat beragama menjadi semangat individualisme yang lebih terarah pada diri sendiri. Apalagi jika identitas agama lebih dipersepsikan sebagai "gaya hidup" individualisme, dan bukan lagi pada semangat menggali etika beragama sebagai pedoman kehidupan bersama (solidaritas kemanusiaan) untuk mengatasi masalah-masalah bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Identitas agama lebih ditonjolkan secara parsial dan dangkal, bahkan dipraktikkan secara berlebihan tanpa didasari kesadaran membangun interaksi sosial yang positif sehingga pada akhirnya memicu konflik sosial.⁷

Di sejumlah negara, masalah benturan dan pemisahan yang tegas antara identitas agama dan identitas kebangsaan merupakan wacana yang biasa dan dianggap sebagai perkembangan positif kehidupan politik. Namun, di Indonesia wacana ini masih krusial dan sering menimbulkan ketegangan. Menurut saya, dalam konteks Indonesia wacana ini dapat dilihat dari dua aspek: *Pertama* adalah landasan historis perjuangan bangsa; *Kedua* adalah Pancasila sebagai falsafah kewargaan yang dianut bangsa Indonesia.⁸ Pendapat

yang membenturkan identitas agama dengan identitas kebangsaan di Indonesia jelas bertolak belakang dengan dua landasan tersebut.

Landasan historis adalah sejarah perjuangan kebangsaan yang di dalamnya semangat kebangsaan dan semangat agama berkaitan dengan erat. Sebagai contoh, kita dapat melihat kasus pertempuran di Surabaya pada saat Bung Tomo dengan pidatonya yang berapi-api menggelorakan semangat jihad dengan kalimat takbir mengajak rakyat Surabaya bangkit melawan kembalinya kekuatan kolonial dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia (seperti yang ditayangkan dalam film *Sang Kyai*). Penyematan gelar pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh ulama Islam di Indonesia juga mengindikasikan betapa kuatnya pertautan identitas kebangsaan (nasionalisme) dan identitas agama dalam *nation-building* Indonesia, misalnya: KH Achmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), KH Hasyim Asy'ari (pendiri Nahdlatul Ulama), HOS Tjokroaminoto (tokoh Syarikat Islam), KH Agus Salim (salah seorang bapak bangsa, tokoh ulama dan aktivis Sarekat Islam). Perjalanan hidup tokoh-tokoh tersebut sangat jelas memperlihatkan bagaimana mereka mampu mensinergikan semangat kebangsaan (nasionalisme) dan semangat agama (Islam). Semangat kebangsaan dipupuk dengan motivasi keagamaan, sehingga lahir semboyan cinta tanah air adalah sebagian dari iman.⁹

Landasan filosofis adalah Pancasila. Identitas kebangsaan bangsa Indonesia adalah Pancasila yang idealnya menjadi sumber etika kehidupan berbangsa sehari-hari. Jika kita melihat proses lahirnya Pancasila dan kandungan nilai-nilai interpretatif di dalam rumusan Pancasila maka kita sebenarnya akan mendapati sebuah model kecerdasan budaya dan politik yang luar biasa.

Artinya, Pancasila dapat dipahami sebagai akumulasi dan kulminasi perpaduan unsur-unsur kepelbagaian kebudayaan dan ideologi politik yang mendasari realitas kebangsaan Indonesia yang majemuk ini. Dengan demikian, dalam dirinya Pancasila mewadahi wacana-wacana keindonesiaan yang rentan menjadi sumber pertikaian dan perpecahan di dalam masyarakat Indonesia.

Di dalam Pancasila, identitas kebangsaan dan identitas agama tidak berada pada posisi yang saling berbenturan. Pancasila justru mensinergikan dua identitas tersebut. Falsafah Pancasila menjadikan landasan agama sebagai identitas utama kebangsaan Indonesia, seperti yang dirumuskan sebagai Sila Pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa". Rumusan sila pertama ini jelas menegaskan bahwa identitas kebangsaan Indonesia harus dilandaskan pada religiositas "Ketuhanan yang Maha Esa".¹⁰

Berdasarkan asas Pancasila, nilai-nilai agama memungkinkan untuk dijadikan referensi dalam perundang-undangan sejauh itu merupakan konsensus nasional yang diterima secara konstitusional. Artinya, nilai-nilai etika dan moral agama-agama yang ada di Indonesia, tanpa terkecuali, berpotensi menjadi sumber ideal untuk merumuskan tatanan hukum nasional yang egaliter, terbuka bagi setiap warga negara, dan tidak diskriminatif. Sebagaimana Pancasila itu sendiri merupakan sinergi kreatif antara identitas kebangsaan dan identitas agama, maka agama-agama di Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menyumbang nilai-nilai etika dan moral yang memperkuat solidaritas nasional anak bangsa. Dengan demikian, identitas agama tidak menjadi alasan untuk mendiskreditkan yang

lain, atau malah mendiskriminasi yang lain hanya karena berbeda, tetapi justru memberikan pencerahan bahwa proses membangun kehidupan bersama di Indonesia dapat diperkuat melalui peran agama-agama.

Dalam hal ini, arah perjalanan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak berjalan sama dengan proyek demokratisasi di negara-negara Barat (Amerika Serikat dan Eropa) yang justru menanggalkan identitas agama sepenuhnya dari ruang publik. Demokrasi negara-negara Barat memperkuat sekularisasi pemikiran dan perilaku sosial yang menempatkan urusan agama hanya pada ranah privat. Namun, benarkah identitas agama dapat ditanggalkan sepenuhnya? Kita sudah melihat sejumlah fakta bahwa proyek demokratisasi negara-negara Barat justru bergerak ke arah mempertimbangkan agama secara serius. Para sarjana Barat pun mengakui bahwa masyarakat modern secara global tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari keterikatan dengan urusan agama. Kebangkitan spirit agama-agama yang merambah setiap masyarakat dalam proses globalisasi mengindikasikan bahwa identitas agama patut diperhitungkan dalam perjalanan kehidupan suatu masyarakat atau negara. Di situlah revitalisasi dan reinterpretasi nilai-nilai etis dan moral kebangsaan dalam Pancasila menjadi agenda penting membangun masa depan Indonesia.

Penutup

Tulisan sederhana ini merupakan upaya kecil untuk memahami perspektif keindonesiaan yang dibangun oleh Prof. John Titaley dalam berbagai materi kuliah dan tulisan-tulisannya. Konsistensi beliau dalam mengusung gagasan Pancasila sebagai agama sipil Indonesia

sebenarnya didasari oleh keprihatinan filosofis dan sosiologis untuk menemukan simpul kebangsaan yang mengikat berbagai unsur sosial masyarakat Indonesia. Pancasila, bagi beliau, menjadi ruang perjumpaan dimana setiap anak bangsa berdialog dan berinteraksi secara setara. Di sinilah dialektika identitas primordial (etnisitas dan agama) dan identitas nasional (Indonesia) pada hakikatnya menjadi tantangan utama masyarakat-masyarakat lokal di kepulauan Indonesia. Bukan untuk diabaikan, tetapi dimaknai terus-menerus secara kontekstual di atas kepentingan bersama sebagaimana kesepakatan berbangsa yang telah diikrarkan para pendiri bangsa Indonesia.

Tanpa Pancasila, Indonesia bukanlah Indonesia, demikian sering dinyatakan oleh Pak John. Keyakinannya yang teguh untuk menjadikan Pancasila sebagai etika dan moral berbangsa sebenarnya merupakan ajakan untuk setiap orang agar tidak lagi terkungkung dalam cara pandang eksklusif menurut paradigma keagamaannya sendiri atau etnisitasnya. Dalam konteks kemajemukan Indonesia, setiap orang diajak untuk melampaui identitas primordialnya dan berjumpa pada titik identitas nasional melanjutkan proyek “menjadi Indonesia” yang egaliter seperti yang disepakati para pendiri bangsa ini. Semoga!

Selamat Ulang Tahun, Pak John!

Catatan Akhir:

1. Abdullah Alawi, “Agama dan Nasionalisme” dalam <http://www.nu.or.id/> diakses 17 April 2014.
2. Anonim, “Nasionalisme” dalam <http://id.wikipedia.org>, diakses 17 April 2014.
3. Anonim, “Nasionalisme” *ibid.*, diakses 17 April 2014.
4. Didi, “History-Social-Culture” dalam www.newhistorian.wordpress.com, diakses 17 April 2014.
5. Didi, *ibid.*, diakses 17 April 2014.
6. Didi, *ibid.*, diakses 17 April 2014.
7. Muhammad Aldhira, “Agama dan Nasionalisme (Rubrik Opini Harian *Republika* 18-juni-2011)” dalam <http://aldhira.wordpress.com>, diakses 17 April 2014.
8. Aldhira, *ibid.*, diakses tanggal 17 April 2014.
9. Aldhira, *ibid.*, diakses 17 April 2014.
10. Aldhira, *ibid.*, diakses 17 April 2014.